



## Reformasi Pendidikan sebagai Tuntutan Sejarah

Nawawi \*)

\*) Penulis adalah Magister Humaniora alumni Program Studi Antropologi Pascasarjana UGM, dosen tetap di Jurusan Komunikasi (Dakwah) STAIN Purwokerto.

**Abstract:** The system of national education considered necessary a reform. During the time national education only yielding depressed human being, is not critical and is not creative, thinking and acting only according to power structure. National education have to be returned to powered of society and to realize the new vision of society Indonesia which Madani. National education represent the demand fundament commended by constitution 1945. Therefore national education have to as according to constitution, realizing democratic society, esteem the human right and form of government smart Indonesian nation. **Keywords:** *reform, education, history.*

### Pendahuluan

Masyarakat Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi. Era reformasi telah lahir, dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Dalam bidang pendidikan nasional juga telah muncul pandangan mengenai perlunya reformasi pendidikan nasional. Maraknya tuntutan reformasi total dalam kehidupan berbangsa, termasuk di dalamnya reformasi pendidikan nasional, semakin lama semakin perlu. Hal ini mengingat proses pendidikan merupakan salah satu tuntutan konstitusi yang mengatakan bahwa tujuan untuk membangun negara yang merdeka ini ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan jelas di sini dinyatakan betapa pendidikan nasional merupakan salah satu tuntutan fundamental yang diamanatkan oleh konstitusi 1945. Dengan kata lain, tujuan kita membentuk negara ialah untuk melahirkan bangsa Indonesia yang cerdas. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dengan demikian sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa.<sup>1</sup>

Di masa Orde Baru telah tercipta suatu kehidupan berbangsa yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Ternyata pemerintah yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, yang tidak kritis, yang bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdikan pada kepentingan kelompok. Dengan sendirinya pula pendidikan nasional Indonesia haruslah dikembalikan fungsinya pada pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembalikan kedaulatan rakyat untuk membangun dirinya sendiri. Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi baru masyarakat Indonesia, yaitu suatu masyarakat madani Indonesia.<sup>2</sup>

Sejarah merupakan faktor budaya yang paling penting dan telah mempengaruhi filsafat pendidikan, baik dalam tujuan maupun sistemnya pada masyarakat manapun juga.<sup>3</sup> Kepribadian nasional, misalnya, yang menjadi dasar filsafat pendidikan di berbagai masyarakat haruslah “*jauh ke masa lampau*”,



walaupun sistem-sistemnya adalah hasil dari pemerintahan revolusioner. Sistem yang didirikannya dengan sengaja untuk mengembangkan dan memperbaiki pola-pola warisan budaya dari umat dan rakyat. Hal ini adalah warisan budaya suatu bangsa yang sukar dikalahkan atau dihilangkan dengan segera. Gerakan revolusi yang paling keras pun harus menyesuaikan prinsip-prinsip dan pemikiran yang baru dengan situasi dan kondisi sejarah dan budaya yang sedang mewujud. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional berakar tunjang pada masa lampau dan berbatang serta berdaun dengan dunia hari ini dan esok.<sup>4</sup>

Telah kita lihat betapa pendidikan dan cita-cita nasional tidak dapat dipisahkan sesuai dengan amanat konstitusi. Proses pendidikan nasional merupakan pelaku-pelaku untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut. Dengan demikian, apabila kita ingin mereformasi pendidikan nasional, maka perlulah sistem pendidikan nasional itu mempunyai visi yang jelas, visi yang sesuai dengan konstitusi, yaitu mewujudkan suatu masyarakat demokrasi, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia dan mengembangkan tanggungjawab anggota masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan itu.

Pendidikan bukanlah segala-galanya, namun tanpa pendidikan yang baik cita-cita kehidupan bersama tidak dapat diwujudkan. Selain itu, untuk mempersiapkan manusia dan diri bangsa Indonesia memasuki kehidupan millenium ketiga dengan tuntutan-tuntutan globalnya, reformasi pendidikan nasional merupakan suatu yang sangat perlu.<sup>5</sup>

Reformasi pendidikan sebagai tuntutan sejarah, berusaha menyingkap kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor budaya yang berdiri di belakang sistem-sistem pendidikan di setiap masyarakat.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, tidaklah aneh bila semua kekuatan budaya yang berpengaruh pada sistem pendidikan, sampai-sampai yang berkaitan dengan aspek peradaban dikembalikan pada faktor sejarah.<sup>7</sup>

Sejarah merupakan kekuatan-kekuatan budaya, dari celah-celah kekuatan-kekuatan budaya yang dibentuk oleh sejarah ini, identitas nasional itu tampak dan mempengaruhi sistem pendidikan. Itulah sedikit yang dapat dikatakan mengenai sejarah sebagai salah satu asas pendidikan yang nanti akan dibicarakan lebih panjang mengenai reformasi pendidikan, visi, dan misi, serta tantangannya.

## **Problematika Pendidikan yang Kita Hadapi**

Menurut Mastuhu, keberhasilan suatu pembangunan termasuk pendidikan selalu disertai tantangan-tantangan baru bahkan dampak negatifnya sekaligus. Sebagai antisipasi diperlukan respons dan perlakuan baru yang lebih baik termasuk dalam hal pendidikan.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan sekarang ini dirasakan adanya keprihatinan terhadap dunia pendidikan. Usaha untuk mencapai paradigma baru pendidikan tidak pernah berhenti sesuai dengan tantangan jaman yang terus berkembang. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pemikiran untuk mencari paradigma baru pendidikan itu bersifat reaktif dan defensif. Upaya untuk mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis yang proaktif dan antisipatif, mendahului masalah yang akan hadir di masa yang akan datang, juga harus mampu mempertahankan



nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan, apalagi dalam kehidupan modern dan dunia globalisasi sekarang ini.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan persoalan di atas, maka tantangan yang bersifat mendasar terhadap sistem pendidikan, antara lain:

1. Mampukah sistem pendidikan menjadi *center of excellence* bagi pengembangan Iptek yang tidak bebas nilai?
2. Mampukah sistem pendidikan menjadi agen pembaharu pemikiran yang responsif terhadap tantangan jaman tanpa mengabaikan aspek dogmatis yang wajib diikuti?
3. Mampukah pendidikan menumbuhkembangkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan lengkap dengan kemampuan bernalar ilmiah yang tidak mengenal batas akhir?<sup>10</sup>

Menyoroti problematika pendidikan di negara kita dewasa ini, jelas bukan persoalan sederhana. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat. Namun demikian, masalah pendidikan bukan masalah yang berdiri sendiri. Pendidikan dapat dinyatakan sebagai persimpangan jalan antara perkembangan sosial budaya, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar, di dalam pendidikan kini mulai dipersoalkan; “Apakah yang dapat diperbuat oleh manusia terhadap manusia lain? Apakah yang dapat diperbuat manusia terhadap generasi selanjutnya? Apakah yang dapat diperbuat manusia terhadap lingkungannya? Apakah yang dapat diperbuat manusia terhadap terwujudnya masyarakat teknologi?”<sup>11</sup>

Jawaban pada masalah-masalah itu semua dilemparkan pada pendidikan, karenanya pendidikan menjadi pusat perhatian semua orang. Begitu terlihat cacat, maka gencar pula serangan masyarakat terhadap pendidikan, bahkan menukik kepada penyelenggara pendidikan. Tantangan pendidikan akan lebih berat lagi di era global seperti sekarang ini, tantangannya meningkat pada tuntutan bangsa untuk berkompetisi dengan perkembangan dunia yang semakin terbuka.<sup>12</sup>

Sungguh tidak mudah untuk memenuhi segenap harapan di atas. Pemenuhan reformasi dalam pendidikan tergantung pada berbagai hal, yakni (1) kesiapan komunitas pakar ilmu pengetahuan dan teknologi dari generasi dewasa ini beserta institusi mereka untuk terjun dan berpacu dalam pergaulan ilmiah internasional, (2) kesiapan sistem pendidikan kita untuk membimbing bibit-bibit pakar dalam generasi muda secara efisien dan sistematis menurut ukuran mutakhir, dan (3) kesiapan kultural masyarakat kita pada umumnya untuk menghadapi dan menanggapi perubahan kemajuan yang terjadi secara global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sikap dewasa.<sup>13</sup> Masalah tersebut akan semakin kompleks lagi kalau kita ingat bahwa tugas pendidikan bukanlah hanya mempersiapkan bangsa untuk hidup dalam masyarakat yang dilanda perubahan, tetapi juga untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat itu sendiri untuk mengendalikan perubahan-perubahan tadi.

## Reformasi Pendidikan sebagai Tuntutan Sejarah



Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan kita sedikit demi sedikit kehilangan wataknya yang mempunyai kekuatan kultural yang tinggi. Pada jaman kolonial kita telah memiliki suatu sistem yang dapat dibanggakan, kita telah bisa melahirkan sistem pendidikan yang mempunyai nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Akan tetapi, sejak tahun-1960 sedikit demi sedikit pendidikan kita memperlihatkan kelesuan. Sistem pendidikan kita tidak memahami gejala sosio-kultural yang terjadi di sekitarnya.<sup>14</sup>

Apabila reformasi dituntut dalam semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia, maka berarti pendidikan nasional pun menuntut reformasi. Dalam sejarah perkembangan pendidikan nasional kita tampak betapa pendidikan nasional kerap kali dijadikan sekadar sarana untuk mempertahankan struktur kekuasaan politik tertentu. Namun demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam mengarahkan perjalanan hidup masyarakat atau bangsa.

Nilai-nilai reformasi untuk membentuk masyarakat baru Indonesia hanya dapat terwujud apabila pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari paket reformasi total dalam masyarakat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa tanpa pendidikan yang relevan, cita-cita reformasi akan sia-sia.<sup>15</sup>

Mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang menuntut pergeseran paradigma masyarakat Indonesia dewasa ini, tentunya meminta *reposisi* dan *renovasi* pendidikan nasional. Pendidikan kita belum menunjang jiwa reformasi, yaitu jiwa yang menginginkan masyarakat demokrasi, masyarakat terbuka, pemerintahan yang bersih, masyarakat transparan, masyarakat yang berdasarkan kerakyatan, dan bukan karena kolusi ataupun untuk kepentingan kelompok sendiri.<sup>16</sup>

Reformasi pendidikan pada umumnya terjadi dengan adanya tentangan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Pendidikan diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akan lebih mudah mengidentifikasi krisis pendidikan yang terjadi, dengan didasarkan pada indikator yang diukur dari tidak tercapainya tujuan tekanan pendidikan itu. Masyarakat yang belum “*melek*” Iptek, merupakan gejala krisis pendidikan yang menekankan pada Iptek. Meningkatnya tingkat kemiskinan, meluasnya tenaga yang tidak memiliki keterampilan, para pekerja yang tidak disiplin dan tidak *kompetitif*, dapat dinyatakan sebagai krisis pendidikan yang menekankan pada tekanan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki jati diri bangsa, yang nasionalismenya lemah, dan tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa dapat dinyatakan sebagai krisis pendidikan yang menekankan pada integritas bangsa.

Saat ini pendidikan kita telah ditekankan pada integritas bangsa, tetapi belum didukung oleh tekanan Iptek dan ekonomi. Oleh karena itu, relevansi pendidikan mulai menjadi topik penting dalam strategi pendidikan di Indonesia agar pendidikan kita bermakna bagi kehidupan, diri sendiri, maupun masyarakat. Perlu menjadi perhatian kita semua seberapa jauh perubahan pendidikan kita dapat ditarik *linearitas* pertumbuhannya yang menunjukkan semakin meningkatnya kualitas. Justru hal ini yang belum jelas, perubahan-perubahan yang terjadi makin tampak sporadis.

Kalau kita sekarang ingin melakukan reformasi pendidikan yang benar-benar mendasar, maka kita harus melakukan perubahan yang dapat mengembalikan wawasan profesionalisme yang telah hilang.



Kita harus melakukan perubahan yang dapat mengembalikan semangat patriotisme kepada sistem pendidikan kita. Kita harus membuat perubahan yang dapat membuat sistem pendidikan kita memahami proses sosio-kultural yang sedang berlangsung dalam masyarakat kita. Kita harus melakukan perubahan yang dapat menyetatkan sistem pendidikan kita dari penyakit *naivitas politik*.<sup>18</sup>

Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara meninjau sistem pendidikan kita secara *internal* dan secara *eksternal*. Ditinjau secara *internal*, reformasi pendidikan baru dapat dilaksanakan dengan benar apabila telah dilakukan langkah nyata untuk mengembalikan fungsi pendidikan sepenuhnya kepada sekolah-sekolah kita. Ditinjau secara *eksternal*, reformasi pendidikan baru dapat dikatakan terjadi kalau telah dilakukan langkah-langkah yang membuat sistem pendidikan kita menjadi integral dengan reformasi besar yang kita dambakan bersama sekarang ini, reformasi politik, reformasi ekonomi, hukum, kultural, dan lain-lain.<sup>19</sup>

### **Tinjauan Internal**

Kebekuan dalam dunia pendidikan ini mulai timbul sejak tahun 1963, ketika kebebasan berpikir dalam lembaga kita sedikit demi sedikit digerogoti oleh birokrasi pendidikan yang pada waktu itu diawali berwatak *politik*. Sejak tahun 1978 muncul suasana yang sangat *restriktif*, yang pada dasarnya mengatakan bahwa yang boleh berpikir hanyalah birokrasi pendidikan saja. Birokrasilah yang menentukan segala-galanya dalam bidang pendidikan.

Suasana demikian telah merusak sistem pendidikan yang ada. Di beberapa universitas barangkali masih tersisa iklim pendidikan yang benar, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kebebasan berpikir kepada anggota-anggota staf pendidikan. Akan tetapi, di tingkat SD, SLTP, dan SLTA suasana pendidikan yang seperti ini telah hilang.

Selama kebekuan tersebut belum dicairkan, selama itu pula sistem pendidikan tidak akan dapat melaksanakan tugas pendidikan secara benar. Selama itu pula kita tidak bisa memperbaiki kesalahan fundamental yang terjadi di sekolah-sekolah kita.

Berbagai kebebasan dalam pendidikan, seperti kebebasan mendidik; selama birokrasi tetap bersikeras bahwa dirinyalah yang paling tahu apa yang dibutuhkan sekolah dan siswa, dirinyalah yang paling berhak untuk menentukan apa yang harus terjadi di sekolah dan apa yang harus disediakan untuk sekolah.<sup>20</sup>

Jadi, ditinjau secara internal, reformasi pendidikan yang mendasar adalah reformasi yang mampu mengembalikan otonomi paedagogis kepada sekolah dan guru. Reformasi seperti ini menuntut peninjauan ulang terhadap seluruh ketentuan yang ada mengenai hubungannya antara birokrasi pendidikan pada satu pihak dengan sekolah dan guru-guru pada pihak yang lain.

Reformasi pendidikan yang berarti dalam keadaan kita sekarang ini sangat bergantung kepada sikap dan tindakan birokrasi pendidikan.<sup>21</sup> Apa yang dapat dilakukan masyarakat, terutama orangtua dan guru ialah mengemukakan dengan jelas segala sesuatu yang mereka rasakan tidak benar dalam kehidupan sekolah sekarang ini, dan mengemukakan secara jelas perubahan mengenai bagaimana sekolah membimbing putra-putri mereka dalam mengembangkan bakat-bakat khusus mereka masing-masing.



## Tinjauan Eksternal

Bagaimana membuat sistem pendidikan menjadi bagian integral dari reformasi *politik, ekonomi, hukum*, serta reformasi lain yang kita harapkan akan terjadi dalam masyarakat kita. Reformasi politik sebagai upaya untuk memulihkan dan mengembangkan demokrasi dalam masyarakat kita. Kalau sekolah berhasil menanamkan dalam diri para siswa kecintaan terhadap demokrasi, maka masyarakat kita akan semakin demokratis. Sebaliknya, kalau sekolah kita gagal menanamkannya, maka apa yang kita perjuangkan selama ini tidak akan dapat terlaksana dengan penuh. Hal penting yang perlu dilakukan sekarang adalah dengan memulai apa yang dapat kita lakukan, yaitu mengubah kurikulum. Akan tetapi, mengubah guru agar dapat bersifat demokratis terhadap murid-muridnya tidak dapat dilakukan secara *gebrakan*. Hal ini hanya dapat terjadi atas dasar kesadaran guru-guru.<sup>22</sup>

Pada prinsipnya yang harus terjadi di sekolah kita adalah adanya kurikulum yang akan melahirkan berbagai macam kegiatan pendidikan untuk menuntun para siswa memahami dan menerima nilai-nilai demokrasi. Hal ini meliputi antara lain (1) kegiatan membentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat, (2) latihan-latihan untuk mengembangkan kemampuan untuk menayakan pendapat mereka secara jelas dan sopan, (3) latihan-latihan untuk membentuk kemampuan mengambil keputusan bersama mengenai masalah-masalah yang menyentuh kepentingan bersama.<sup>23</sup> Pembaruan kurikulum hanya merupakan salah satu langkah dalam reformasi pendidikan.

Reformasi ekonomi sebagai upaya untuk mengembangkan kehidupan ekonomi yang bersifat terbuka dan adil, serta mengupayakan kehidupan ekonomi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengutamakan demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan koneksi.

Ada tiga hal yang harus dilakukan berkaitan dengan masalah di atas, yaitu (1) mendidik para siswa untuk menjauhi segala praktik yang bersifat curang, (2) mengajarkan kemampuan untuk mengetahui nilai ekonomis dari segenap pengetahuan dan keterampilan yang mereka kuasai, (3) membiasakan para siswa bersifat terbuka, bersedia dikontrol dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok.

Reformasi dalam bidang hukum mempunyai dua aspek, yaitu mengadakan perubahan terhadap sejumlah instrumen hukum yang sekarang ini berlaku dalam masyarakat kita dan membuat seluruh lapisan masyarakat menghormati dan menaati segenap hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Berdasarkan analisis di atas, maka reformasi pendidikan yang dapat membuat sekolah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses reformasi yang sedang berlangsung di masyarakat, ialah reformasi yang dicapai melalui pembinaan kesadaran tentang makna nilai dan tata nilai.

## Visi dan Misi Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional dikehendaki haruslah bersifat fungsional, yaitu berfungsi untuk kepentingan kelembagaan masyarakat menuju perkembangan kehidupan bangsa yang menyangkut pengembangan pribadi dan watak bangsa. Oleh karena keduanya ini merupakan kriteria dasar dalam upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional.



Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pasal 16, ayat (2) menyatakan bahwa “Tujuan pendidikan nasional adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian”. Namun, agar semua pelaksana pendidikan dapat mengoperasikan pencapaian tujuan itu, maka masih diperlukan rambu-rambu dasar ke mana orientasi dasar diarahkan. Tujuannya supaya dapat dijadikan rambu-rambu pelaksana pendidikan menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional kita.<sup>25</sup>

Orientasi pendidikan akan mampu memberikan capaian-capaian terminal proses pendidikan. Dari terminal capaian-capaian tersebut, akhirnya diperoleh tujuan umum seperti yang ditetapkan pada UU. No. 2/1989.

Visi pendidikan tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional tidak lain adalah mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang Bhineka.<sup>26</sup> Pendidikan Islam perlu mengkaji kembali hal-hal yang selama ini belum dibenahi sesuai dengan kemajuan jaman. Dalam kaitannya dengan ini perlu dikaji sejauh mana subsistem pendidikan Islam mempunyai nilai-nilai yang tidak kalah pentingnya dan relevansinya di dalam pembangunan pendidikan nasional.

Ada dua alasan yang mendukung perlunya reformasi dalam pendidikan Islam, yaitu: (1) Indonesia sebagai negara besar memerlukan layanan pendidikan yang berkualitas, tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar saja, tetapi juga sampai pada jenjang perguruan tinggi; pendidikan Islam sesungguhnya dimaksudkan untuk menumbuhkan nilai-nilai keislaman secara akademik, kritis, dan rasional, sesuai dengan al-Qur’an menurut pola yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW; (2) kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang mempertautkan pada pendidikan Islam. Sejak diberlakukannya sistem pendidikan nasional yang mengharuskan sekolah-sekolah agama menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah umum, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat.<sup>27</sup>

Reformasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan visi reformasi, yaitu terwujudnya tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi kemerdekaan 1945, untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat pancasilais yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan mandiri, serta berwawasan budaya.<sup>28</sup>

Apabila pendidikan tidak mengembangkan kemampuan kreatif dan produktif, maka yang menjadi masalah mendasar adalah terjadinya kejumudan. Untuk mengubah keranjingan masyarakat pada masalah pendidikan yang berakar dari usaha yang lebih mendasar, yakni mereformasi sistem pendidikan nasional.<sup>29</sup> Sistem pendidikan yang tidak menanamkan berpikir kreatif akan menghasilkan



manusia robot tanpa memiliki kreativitas.<sup>30</sup> Dia akan bertindak sesuai dengan *remote control*-nya. Mahasiswa-mahasiswa Asia dewasa ini terkenal dalam penguasaan ilmu-ilmu eksakta, namun hal tersebut bukan merupakan jaminan bahwa bangsa-bangsa Asia mampu bersaing dengan bangsa lain. Hal ini hanya dapat terjadi apabila reformasi sistem pendidikan di Asia diarahkan pada lahirnya manusia-manusia yang produktif dan kreatif.

Reformasi sistem pendidikan nasional Indonesia juga harus berpikir kreatif dan produktif. Metodologi pembelajaran dan situasi kehidupan kampus bukan lagi didasarkan kepada simbol-simbol kemegahan, tetapi kepada kapasitas dan pengembangan berpikir kritis dan kreatif. Dengan demikian, keranjingan terhadap gelar akademik akan sirna dengan sendirinya.<sup>31</sup>

Apabila sistem pendidikan telah mapan dan tertata dengan baik, maka akan melahirkan masyarakat yang profesional. Masyarakat profesional merupakan manusia-manusia yang dapat berpikir kreatif dan produktif. Kemampuan profesional dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Prestasi seseorang tidak diukur oleh gelar akademik yang disandangnya, tetapi pada kemampuannya untuk mewujudkan sesuatu yang baru, yang lebih baik. Dengan demikian, gelar akademik bukan merupakan tujuan primer, tetapi hanya sekadar merupakan akibat dari usaha keras untuk meningkatkan kapasitas kita di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.<sup>32</sup>

Melahirkan dunia akademik yang profesional harus didasarkan kepada sistem pendidikan yang menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif. Usaha ini ternyata memerlukan kesabaran dan persiapan yang cukup panjang. Bangsa kita belum terlambat untuk memulai, dan marilah kita mulai sekarang juga.

## Kesimpulan

Reformasi pendidikan nasional akan dapat terlaksana apabila ada kesungguhan pada diri sendiri untuk berusaha mengubahnya ke arah yang lebih baik, terutama pada birokrasi yang secara langsung menangani masalah tersebut. Kesungguhan tersebut dapat terlihat dari kesiapan komunitas pakar ilmu pengetahuan dan teknologi dari generasi dewasa ini beserta institusi mereka untuk terjun dan berpacu dalam pergaulan ilmiah internasional; kesiapan sistem pendidikan kita untuk membimbing bibit-bibit pakar dalam generasi muda secara efisien dan sistematis; dan kesiapan kultural masyarakat kita untuk menghadapi dan menanggapi perubahan beserta kemajuan yang terjadi secara global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sikap dewasa. Apabila reformasi dituntut dalam semua bidang kehidupan masyarakat, maka berarti pula pendidikan nasional pun menuntut reformasi. Oleh karena itu, selama kebebasan dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, dan budaya belum diberikan sepenuhnya pada masyarakat, selama itu pula reformasi pendidikan nasional tidak akan terwujud.

Terciptanya kondisi lembaga pendidikan yang bersih dari penyakit merasa paling benar sendiri akan melahirkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya, baik dalam berdemokrasi maupun dalam mengembangkan kreativitasnya dalam segala bidang.



Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka reformasi, yaitu reformasi pendidikan nasional harus terjadi karena adanya tantangan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Reformasi pendidikan diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akan lebih mudah mengidentifikasi krisis pendidikan yang terjadi dengan didasarkan pada indikator yang diukur dari tidak tercapainya tujuan tekanan pendidikan.

Berdasarkan analisis di atas, maka reformasi pendidikan yang dapat menjadikan sekolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses reformasi yang sedang berlangsung di masyarakat adalah reformasi yang dicapai melalui pembinaan kesadaran tentang makna nilai dan tata nilai.

## Endnote

<sup>1</sup> H.A.R. Tilaar, (Ed.), *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosa Karya, 1999), hal. 3-4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>3</sup> *Filsafat pendidikan* merupakan titik permulaan dalam proses pendidikan, juga menjadi tulang punggung ke mana bagian-bagian yang lain dalam pendidikan itu bergantung dari segi tujuan-tujuan pendidikan. Lihat, Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000), hal. 33.

<sup>4</sup> Djohar, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: IKIP Negeri, 1999), hal. 20-23.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>6</sup> I.L. Kandell, *American Education In The Twentieth Century* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hal. 5.

<sup>7</sup> Kazamias and Massialas, *Tradition and Change In Education: A Comparative Study* (Englewood Cliff: Prentice Hall, 1965), hal. 32.

<sup>8</sup> Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. xi.

<sup>9</sup> Abdurrahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 2.

<sup>10</sup> Mastuhu, *Memberdayakan*, hal. 37-38.

<sup>11</sup> Djohar, *Reformasi*, hal. 13-14.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>13</sup> Mochtar Buchori, *Pendidikan dalam Pembangunan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hal. 47.

<sup>14</sup> Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 61.

<sup>15</sup> Reginald D. Archambault, *John Dewey: Philosophy of Education* (New York: The Macmillan Company, 1964), hal. 437.

<sup>16</sup> Djohar, *Reformasi*, hal. 29-30.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 29-30.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 62.

<sup>19</sup> Mochtar Buchori, *Pendidikan*, hal. 61.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 66.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>25</sup> Djohar, *Reformasi*, hal. 15.

<sup>26</sup> Syaffi Ma'arif, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 155.

<sup>27</sup> Fuadudin dan Cik Hasan Bisri, *Dinamika Pemikiran Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Logos, 2002), hal. 110.

<sup>28</sup> *Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta, 28 Oktober 1998.



<sup>29</sup> H.A.R. Tilaar, *Pendidikan*, hal. 129.

<sup>30</sup> Asiaweek, *Asia In The Millenium*, Agustus, 1999, 20-27.

<sup>31</sup> H.A.R. Tilaar, *Pendidikan*, hal. 129.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 129.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdurrahman. 2001. *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Archambault, Reginald D. 1964. *Dewey, 1964 John Philosophy of Education*. New York: The Macmillan Company.
- Asiaweek. 1999 *Asia In The Millenium*; Agustus.
- Buchori, Mochtar. 1994. *Pendidikan dalam Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- . 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djohar. 1999. *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: IKIP Negeri Yogyakarta.
- Fuadudin, dkk. 2002. *Dinamika Pemikiran Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Logos.
- Kandell. 1957. *American Education in The Twentieth Century*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Kazamias and Massialas. 1965. *Tradition and Change In Education: A Comparative Study*. Englewood Cliff: Prentice Hall.
- Langgulung, Hasan. 2000. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Husna Zikra.
- Ma'arif, Syafi'i. 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosa Karya.
- Tim Kerja Peduli Reformasi. 1998. *Pendidikan Nasional*. Jakarta, 28 Oktober.